



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH



bapenda@banyumaskab.go.id 

bapenda.banyumas.go.id 

[bapenda.banyumas](https://www.instagram.com/bapenda.banyumas) 

(0281) 636266 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan serta memperhatikan perkembangan kebijakan, kondisi, dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Dokumen ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Perubahan Renja ini memuat penyesuaian terhadap program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, indikator, pendanaan, serta prakiraan maju yang diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di bidang pendapatan daerah tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan mampu menjawab dinamika pelaksanaan pada tahun anggaran 2026.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Agustus 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670128 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. LANDASAN HUKUM.....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II.....	14
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026.....	14
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DAN ANALISIS KINERJA.	14
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.	36
2.3 REVIU TERHADAP RENJA TAHUN 2026.....	37
BAB III.....	46
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	46
3.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).....	53
BAB IV.....	54
PENUTUP	54
LAMPIRAN I.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Pada tingkat perangkat daerah, perencanaan tersebut diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode lima tahunan serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan semester pertama tahun berjalan, serta mempertimbangkan perkembangan kebijakan, perubahan asumsi, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah yang memerlukan penyesuaian terhadap target kinerja maupun pendanaan.

Penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2026. Dokumen ini memuat penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, kelompok sasaran, lokasi, serta pagu indikatif yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Banyumas

Tahun 2025–2029. Selanjutnya, Perubahan Renja menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Perubahan) Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, penyusunan Perubahan Renja tetap memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan. Dengan demikian, penyesuaian yang dilakukan tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan pada tingkat nasional, provinsi, dan daerah, sehingga tercipta sinergi perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, perubahan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, mengoptimalkan pengelolaan basis data perpajakan daerah, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada sisa tahun anggaran dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, terarah, dan akuntabel sesuai dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan daerah. Melalui dokumen ini, Badan Pendapatan Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

1419);

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6)
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 110);
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35);
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 26);

26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 91).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penyesuaian pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, serta pendanaan pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan tahun berjalan, sehingga tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan serta perkembangan kondisi, kebijakan, dan kemampuan keuangan daerah.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Menjaga keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

4. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja dan Pendapatan Asli Daerah melalui penyesuaian strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan kondisi pelaksanaan tahun berjalan.
5. Menjadi dasar dalam pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah pada sisa Tahun Anggaran 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagaimana tertera pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renja Perangkat Daerah, dasar dan proses penyusunannya, alasan perlunya perubahan, serta keterkaitannya dengan Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dijelaskan pula keterkaitan Perubahan Renja dengan proses penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Perubahan).

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta ketentuan lainnya yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja, termasuk ketentuan mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah, kewenangan, serta pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DAN ANALISIS KINERJA.

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta analisis terhadap capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan. Uraian pada subbab ini mencakup tingkat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja, serta rekomendasi sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026.

- a. Tabel Capaian Kinerja Utama / Tujuan dan Sasaran sampai dengan TW II Tahun 2026 (disertakan dengan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja tujuan/ sasaran);
- b. Tabel Capaian Kinerja Program s.d. Sub Kegiatan sampai dengan TW II Tahun 2026 (disertakan dengan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan);
- c. Tabel Capaian Kinerja Keuangan s.d. TW II Tahun 2026.

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Memuat isu-isu strategis dan permasalahan penting yang memengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Uraian pada subbab ini mencakup tantangan, peluang, serta faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penentuan prioritas dan penyesuaian kebijakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026

2.3 REVIU TERHADAP RENJA TAHUN 2026

Memuat Tabel/ Matriks hasil reviu tahun 2026, yang membandingkan realisasi capaian tahun 2025, Target induk dan Pagu indikatif induk tahun 2026 dengan Kebutuhan perubahan Target dan Pagu Indikatif tahun 2026 dari Tujuan s.d. Sub Kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan tahun berjalan serta perkembangan kebijakan dan kebutuhan daerah.

Dengan memperhatikan:

- a. Berisi lengkap Tujuan s.d Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 berdasarkan Renstra 2025-2029;
- b. Penyesuaian/ perubahan target kinerja tahun 2026 yang membutuhkan perubahan target baik level Tujuan s.d. Sub Kegiatan;
- c. Tidak terdapat penambahan indikator Tujuan s.d. Program diluar indikator di dalam renstra;
- d. Penambahan indikator Kegiatan s.d. sub kegiatan berdasarkan hasil reviu cascading/ renja 2026;
- e. Tidak terdapat penambahan indikator LPPD/ IKK baru (berdasarkan kepmendagri 900.1-861 Tahun 2026). Indikator LPPD/IKK baru masuk dalam sub bab 3.2. dalam tabel tersendiri, tidak masuk matriks cascading Perubahan Renja Tahun 2026;
- f. Penambahan Sub Kegiatan baru Tahun 2026 jika terdapat mandatory dari pemerintah pusat/ instansi/ Lembaga terkait lainnya.

3.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sebagai tolok ukur pencapaian kinerja perangkat daerah. IKK disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun

2025–2029 serta menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja Tahun Anggaran 2026.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian/ penjelasan dan kesimpulan atas penyusunan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

LAMPIRAN

Berisi register risiko berupa identifikasi risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Perubahan Tahun 2026.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DAN ANALISIS KINERJA.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja maupun realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan.

Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, serta subkegiatan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, permasalahan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian pada sisa Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

Analisis kinerja dilakukan terhadap capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sebagai dasar penyesuaian target kinerja, indikator, program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi pendanaan agar pelaksanaan pada sisa Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil revidi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana diuraikan di atas disajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.1.1

Tabel Capaian Kinerja Utama / Tujuan dan Sasaran sampai dengan TW II Tahun 2026

TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target kinerja renja tahun berjalan 2026	Realisasi kinerja pada triwulan II	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2026	Permasalahan	Keterangan
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Rasio PAD	%	28	30,43	108,67		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	%	5	13,93	278,6		
	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	5	6,49	77,04		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	88,50	N/A	N/A		
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,35	N/A	N/A		
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,52	N/A	N/A		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tujuan Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal tersebut tercermin dari indikator Rasio PAD yang terealisasi sebesar 30,43%, melampaui target tahun berjalan sebesar 28% atau mencapai 108,67%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year), rasio PAD mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur pendapatan daerah. Capaian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan porsi PAD menjadi lebih dominan dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD menjadi semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di tengah menurunnya proporsi pendapatan transfer.

Sementara itu, sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diukur melalui indikator Persentase Peningkatan PAD juga menunjukkan kinerja yang sangat

baik. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator tersebut mencapai 13,93%, atau 278,60% dari target sebesar 5%. Dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year*), pertumbuhan PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh percepatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada Tahun 2026, pencetakan massal SPPT telah dilaksanakan pada bulan Februari dengan jatuh tempo pembayaran pada 31 Juli 2026, sedangkan pada tahun sebelumnya pencetakan SPPT baru selesai pada bulan April dengan jatuh tempo pembayaran pada bulan September. Percepatan pelaksanaan tersebut mendorong realisasi penerimaan PBB-P2 dapat diperoleh lebih awal hingga Triwulan II. Selain itu, peningkatan PAD juga didukung oleh pelaksanaan berbagai upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan, khususnya pada sektor pajak daerah, melalui pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, optimalisasi pengawasan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, serta penggalan potensi objek pajak secara berkelanjutan.

Di sisi lain, indikator *Revenue Mobilization* yang diukur melalui deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar 6,49% dibandingkan target maksimal sebesar 5%, sehingga tingkat capaiannya mencapai 77,04%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (*year on year*), nilai deviasi menunjukkan peningkatan sehingga masih diperlukan upaya optimalisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak daerah, penguatan pengawasan, dan percepatan realisasi potensi pendapatan akan terus dilakukan pada semester II Tahun 2026 guna menekan deviasi realisasi PAD terhadap target APBD.

Adapun untuk tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Efektivitas Pengendalian, dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Nilai SPIP Perangkat Daerah, dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 belum dapat disajikan karena proses evaluasi dan penilaian masih berlangsung. Hasil penilaian ketiga indikator tersebut baru dijadwalkan tersedia pada semester II Tahun 2026, sehingga capaian kinerjanya belum dapat diukur pada laporan Triwulan II.

TABEL 2.1.2

Tabel Capaian Kinerja Program s.d. Sub Kegiatan sampai dengan TW II Tahun 2026

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN								
			6		7				8		9													12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
			K	RP	K	RP	DPA		K	RP	K	RP												K	RP	K	%	K	RP	K	%
			3	4	4A																										
[1] Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah																															
	Rasio PAD	%	-	-	28	-	28	-	35,51	-	30,43	-	30,43	0	108.68%	-	30,43	0	108.68%	-		ada peningkatan realisasi pada TW II Posisi Juni di komponen pajak daerah dan retribusi daerah	Rasio PAD terhadap APBD sebesar 30,43 didapat dari 561.067.249.965,60 (PAD) sd 30 Juni / 1.843.523.253.012,60 (Pendapatan Daerah)								
[1.1] Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah																															
	Persentase Peningkatan PAD	%	-	-	5	-	6	-	13,38	-	13,93	-	13,93	0	232.17%	-	13,93	0	278.60%	-		Peningkatan realisasi pendapatan Triwulan II Tahun 2026 didorong oleh percepatan cetak massal SPPT PBB-P2 yang selesai dan didistribusikan pada Februari 2026, lebih awal dibandingkan tahun 2025 yang baru selesai pada April. Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah turut mendorong progres positif pada komponen pajak daerah lainnya serta retribusi daerah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya	Peningkatan PAD sebesar 13,93 didapat dari 561.067.249.965,60 (PAD TW II 2026 sd 30 Juni) - 492.445.094.057,00 (PAD TW II 2025 sd Juni) / 492.445.094.057,00 (PAD TW II 2025 sd Juni) Dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2025								
	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-	-	5	-	5	-	9,77	-	6,49	-	6,49	0	77.04%	-	6,49	0	77.04%	-			= (561.067.249.965,60 (Realisasi PAD TW II Juni) / 600.000.000.000,00 (Target PAD TW II Juni))-1 = 6,49%								
[1.1.1] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							-		4.578.070.500		161.012.500		564.919.270		756.231.770		16,518%														
	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	%	-	-	100	-	80	-	0		46,91	-	46,91	0	58.64%	-	46,91	0	46.91%	-			Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih = 46.91% = 40.176.266.506 (Jumlah Piutang Pajak Lunas) / 85.643.051.321 (Jumlah Piutang Pajak TW II)								
	Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak	%	-	-	100	-	100	-	100		100	-	100	0	100.00%	-	100	0	100.00%	-			Wajib pajak yang didaftarkan, didata dan ditetapkan 100% sesuai target								

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN				
									1		2															
			6		7				8		9			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12					15 = 14/5*100			
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP		K	RP	K	%	K	RP				K	%		
3	4	4A	K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%						
	Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	0	100.00%	-	100	0	100.00%	-			jumlah keberatan, pengawasan, dan pemeriksaan yang diselesaikan dibanding jumlah yang diterima atau ditugaskan sudah sesuai target			
	Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	%	-	-	10	-	25	-	-	-	7,09	-	7,09	0	171.64%	-	7,09	0	171.64%	-			Data belum diolah dan sepenuhnya didapatkan			
	Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi	%	-	-	100	-	100	-	0	-	100	-	100	0	100.00%	-	100	0	100.00%	-			Kajian Proyeksi Pendapatan 2026-2027			
	Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	0	100.00%	-	100	0	100.00%	-			Jumlah sistem informasi yang telah diterapkan sudah 100% sesuai yang direncanakan			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Angka	-	-	86	-	87	-	0	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			Belum tersedia nilai di 2026			
	Persentase peningkatan Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Reklame, Dusen, PKB-BPNKD, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	%			109,07		109,07				92,88		92,88													
	Persentase peningkatan Pajak PBB-P2 dan Pajak BPHTp	%			1,21		1,21				76,44		76,44													
	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	%			16,31		16,31				12,75		12,75													
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						-		4.578.070.500		161.012.500		564.919.270		756.231.770		16,518%										
	Persentase Wajib Pajak yang terlayani	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	0	100.00%	-	100	0	100.00%	-			Seluruh wajib pajak sudah terlayani di bagian pelayanan			
	Jumlah Wajib Pajak Official Assessment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan	Angka	-	-	1.165.000	-	1.152.300	-	1.158.147	-	1.159.685	-	2.317.832	0	100.64%	-	2.317.832	0	100.82%	-			Jumlah SPPT PBB-P2 : 1.156.851 Jumlah SKPD Reklame : 1312 Jumlah SKPD Air Tanah : 1522			
	Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	%	-	-	85	-	80	-	0	-	54,62	-	54,62	0	68.27%	-	54,62	0	68.27%	-			Sebesar 54,62 % = 633.371 (Total WP Lunas) / 1.159.685 (total WP TW II)			
	Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	%	-	-	100	-	100	-	0	-	100	-	100	0	100.00%	-	100	0	100.00%	-			Penyelesaian Keberatan Pajak terealisasi 100%			
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	0	100.00%	-	100	0	100.00%	-			Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak 100% terealisasi sesuai rencana			

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN
									1		2								15 = 14/5*100				
			6		7				8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12						
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%			
3	4	4A			K			K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%				
	Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	%	-	-	85	-	100	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			Data Baru bisa didapatkan diakhir periode
	Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/diperbaiki	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	0	100.00%	-	100	0	100.00%	-			seluruh sistem informasi pajak daerah dikembangkan/diperba iki
	Persentase capaian realisasi pendapatan pajak PBB- P2 dan Pajak BPHTB	%			100		100																
	Persentase capaian realisasi pendapatan pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Reklame, Opon PKB BPKNB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	%			100		100																
	Persentase pencapaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diserahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	%			100		100																
	Persentase Sub Komponen Pajak yang mencapai Target	%			N/A		N/A																
5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah							-		154.500.000		7.000.000		36.875.000		43.875.000		13.5914563107%						
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	2	-	2	-	1	-	0	-	1	0	50.00%	-	1	0	50.00%	-			Tidak Ada Realisasi
5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah							-		147.000.000		17.350.000		50.490.000		67.840.000		14.2857142857%						
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	4	-	3	-	1	-	1	-	2	0	66.67%	-	2	0	50.00%	-			1 Dokumen/Laporan Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah TW II 2026
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah							-		901.000.000		-		35.912.500		35.912.500		2.1431514984%						

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN		
			6		7				8		9			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12					15 = 14/5*100	
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP		K	RP	K	%	K	RP				K	%
							K	RP																
3	4	4A																						
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnyaan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	-	-	4	-	12	-	1	-	1	-	2	0	16.67%	-	2	0	50.00%	-	Terdapat perubahan forma pelaporan, yaitu pelaporan dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian da pengawasan pajak dilakukan secara triwulanan. Berdasarkan format tersebut, pada Triwulan II Tahun 2026 telah disusun sebanya 1 dokumenlaporan		Terdapat perubahan format pelaporan, yaitu pelaporan dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak dilakukan secara triwulanan. Berdasarkan format tersebut, pada Triwulan II Tahun 2026 telah disusun sebanyak 1 dokumen/laporan	
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					-		1.221.810 .500		45.465.0 00		317.899 .969		363.364. 969		15.010328 6885%									
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	-	-	4	-	12	-	1	-	1	-	2	0	16.67%	-	2	0	50.00%	-	Terdapat perubahan forma pelaporan, yaitu pelaporan dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian da pengawasan pajak dilakukan secara triwulanan. Berdasarkan format tersebut, pada Triwulan II Tahun 2026 telah disusun sebanya 1 dokumenlaporan		Terdapat perubahan format pelaporan, yaitu pelaporan dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak dilakukan secara triwulanan. Berdasarkan format tersebut, pada Triwulan II Tahun 2026 telah disusun sebanyak 1 dokumen/laporan.	
5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					-		209.017.5 00		-		10.140. 000		10.140.0 00		4.8488762 903%									
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	-	-	20	-	20	-	0	-	0	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			Belum ada realisasi	
5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah					-		1.160.232 .500		72.757.5 00		20.699. 999		93.457.4 99		5.1506989 936%									
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	1.156.8 51	-	1.141.0 00	-	1.156.851	-	0	-	1.156.851	0	101.39%	-	1.156.851	0	101.39%	-			Cetak masal SPPT sudah selesai dilakukan di TW I 2026	
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					-		132.250.0 00		3.500.00 0		54.150. 002		57.650.0 02		20.336559 5463%									
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	-	-	10	-	10	-	10	-	10	-	20	0	100.00%	-	20	0	100.00%	-			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yaitu untuk 1. PBB-P2 2. BPHTB 3. Pajak Reklame 4. Pajak Air Tanah	

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN						
			6		7		1		2		12 = 8+9+10+11					13 = 12/7*100					14 = 6+12		15 = 14/5*100			
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP				K	RP				K	%	K	RP	K	%
							K	RP																		
3	4	4A	K	RP	K	RP REN JA	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%								
																					5. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan 6. PBJT Makanan/Minuman 7. PBJT Jasa Perhotelan 8. PBJT Jasa Perparkiran 9. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 10. PBJT Tenaga Listrik					
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah					-		510.760.000		12.940.000		26.609.900		39.549.900		3.3671323127%											
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	12	-	12	-	3	-	3	-	6	0	50.00%	-	6	0	50.00%	-		1. Dokumen Penagihan Pajak Daerah April 2. Dokumen Penagihan Pajak Daerah Mei 1. Dokumen Penagihan Pajak Daerah April 3. Dokumen Penagihan Pajak Daerah Juni				
5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					-		50.000.000		-		3.355.000		3.355.000		2.4992%											
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	4	-	12	-	1	-	1	-	2	0	16.67%	-	2	0	50.00%	-	Terdapat perubahan format pelaporan, yaitu pelaporan dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak dilakukan secara triwulanan. Berdasarkan format tersebut, pada Triwulan I ITahun 2026 telah disusun sebanyak 1 dokumen/laporan.	Terdapat perubahan format pelaporan, yaitu pelaporan dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak dilakukan secara triwulanan. Berdasarkan format tersebut, pada Triwulan I ITahun 2026 telah disusun sebanyak 1 dokumen/laporan.				
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					-		67.500.000		-		3.155.000		33.455.000		4.673422222%											
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	-	-	4	-	25	-	1	-	1	-	2	0	8.00%	-	2	0	50.00%	-	Terdapat perubahan forma pelaporan, yaitu pelaporan dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian da pengawasan pajak dilakukan secara triwulanan. Berdasarkan format tersebut, pada Triwulan I ITahun 2026 telah disusun sebanyak 1 dokumen/laporan.	Terdapat perubahan format pelaporan, yaitu pelaporan dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak dilakukan secara triwulanan. Berdasarkan format tersebut, pada Triwulan II Tahun 2026 telah disusun sebanyak 1 dokumen/laporan.				

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN
									1		2												
			6		7				8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100				
			K	RP	K	RP	DPA		K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%			
3	4	4A	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%					
																			telah disusun sebanyak 1 dokumen/lapora				
5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah							-	24.000.000		2.000.000		5.631.900		7.631.900	31.8%								
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	-	-	7	-	7	-	7	-	7	-	14	0	100.00%	-	14	0	100.00%	-		Ada tujuh aplikasi pada BAPENDA yang mendukung pengelolaan pajak daerah yang sedang tahap dikembangkan maupun dipelihara	1. Aplikasi Eling PBB 2. Aplikasi E-BPHTB 3. Aplikasi Satria Pajak New 4. Aplikasi SIM PBB 5. Aplikasi Eling SPT 6. Aplikasi MyPBB 7. Aplikasi MyPendataan dengan melakukan update terhadap 1. Fitur TTE di Satria Pajak 2. Fitur TTE SSPD di eling BPHTB 3. Integrasi Satria - Sipanjimas 4. Upgrade UI dan Perbaikan alur Eling-SPT 5. Penyesuaian Alur pada aplikasi Eling-BPHTB 6. Pendaftaran NPWPD Online
[1.2] Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah																							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	-	-	88,5	-	90,15	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			Nilai SAKIP tersedia antara TW III dan IV
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	-	-	3,35	-	3,52	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			Nilai SPIP tersedia antara TW III dan IV
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	-	-	3,52	-	3,6	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			Nilai IPP tersedia antara TW III dan IV
[1.2.1] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							-	12.853.274.962		2.263.378.253		3.096.942.718		5.764.027.064		10.5643032593%							
	IKM Perangkat Daerah	Angka	-	-	95,6	-	95,6	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			Data di SUSANMAS belum tersedia
	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	-	-	83,74	-	100	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			
	Nilai kematangan organisasi	Angka	-	-	47,1	-	47,1	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			
	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	-	-	93,4	-	100	-	15,4	-	34,27	-	49,67	0	34.27%	-	49,67	0	36.69%	-			Realisasi Belanja APBD BAPENDA sampai dengan 30 Juni 34,27%

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN	
									1		2							15 = 14/5*100					
			6		7				8		9			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12					
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP		K	RP	K	%	K	RP				K
3	4	4A																					
																						= 5.974.144.340 / 17.431.345.462	
	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	0	100.00%	-	200	0	100.00%	-			Realisasi 100% sampai dengan Mei 2026
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-	62.230.097	11.450.000	9.285.062	20.735.062	6.2434509784%											
	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	0	100.00%	-	200	0	100.00%	-			Seluruh program pada renja sesuai dengan program pada renstra
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							-	9.430.097	-	5.085.062	5.085.062	41.2011202006%											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	4	-	3	-	1	-	0	-	1	0	33.33%	-	1	0	25.00%	-			tidak ada realisasi
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-	52.800.000	11.450.000	4.200.000	15.650.000	21.6879545455%											
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	-	-	8	-	4	-	2	-	2	-	4	0	100.00%	-	4	0	50.00%	-			1 Laporan Evaluasi Kinerja TW I 2026, 1 laporan evaluasi RTP Operasional 2026
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-	9.635.948.750	1.839.188.695	2.251.277.970	4.328.860.758	10.7800639117%											
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	0	100.00%	-	200	0	100.00%	-			Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100%
	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	0	100.00%	-	200	0	100.00%	-			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) 100%
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							-	9.553.188.750	1.826.588.695	2.239.207.970	4.292.840.758	10.8734524241%											
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	-	47	-	37	-	48	-	47	-	95	0	127.03%	-	95	0	100.00%	-			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN total 46 Orang 35 PNS & 12 PPPK
X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-	77.760.000	12.600.000	12.070.000	36.020.000	16.2069444445%											
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Dokumen	-	-	6	-	4	-	1	-	1	-	2	0	50.00%	-	2	0	33.33%	-			1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN Maret-April
X.XX.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	0%								

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN
									1		2												
			6		7				8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100				
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%			
3	4	4A			K				K		K		K		K		K		K				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	-	-	5	-	12	-	3	-	0	-	3	0	25.00%	-	3	0	60.00%	-			Tidak Ada Realisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah						-		390.458.215		21.163.825		195.163.459		216.327.284		17.4109006004%							
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	0	100.00%	-	200	0	100.00%	-			Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100%
	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Nilai	-	-	70	-	70	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-			Nilai Pengelolaan arsip baru keluar antara TW III dan IV
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						-		10.955.000		-		42.290		42.290		0.39%							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	4	-	4	-	1	-	1	-	2	0	50.00%	-	2	0	50.00%	-			1 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Triwulan II 2026 Pembelian batu baterai
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-		58.580.145		1.200.000		3.144.750		4.344.750		2.2955218018%							
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	4	-	4	-	1	-	1	-	2	0	50.00%	-	2	0	50.00%	-			1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Triwulan II 2026 untuk pengiriman dokumen via pos, pembelian 150 Pcs Materai sbesar, serta Karangan Bunga
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						-		14.998.170		407.000		3.406.216		3.813.216		2.7131843418%							
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	4	-	4	-	1	-	1	-	2	0	50.00%	-	2	0	50.00%	-			1 Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Triwulan II 2026 a. Pembelian plastik sampah b. Pembelian 40 pcs Tissue c. Pembelian isi ulang tabung gas
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						-		75.250.000		7.972.725		47.861.430		55.834.155		40.1998066446%							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	12	-	12	-	3	-	3	-	6	0	50.00%	-	6	0	50.00%	-			2 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan April Mei Juni
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						-		40.420.400		342.600		-		342.600		0.85%							
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	-	-	4	-	4	-	1	-	1	-	2	0	50.00%	-	2	0	50.00%	-			1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Triwulan II

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN						
								1		2					12 = 8+9+10+11					13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
			6		7			8		9															
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K				RP	K				RP	K	%	K	RP	K
3	4	4A																							
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						-		185.270.500		11.241.500		140.708.773		151.950.273		19.6400491173%									
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	12	-	12	-	3	-	3	-	6	0	50.00%	-	6	0	50.00%	-	1. Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD April 2. Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Mei 3. Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Juni				
X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						-		4.984.000		-		-		-		0%									
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	4	-	6	-	1	-	1	-	2	0	33.33%	-	2	0	50.00%	-	1 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD TW II				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-		307.500.000		-		4.980.000		4.980.000		1.62%									
	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	-	-	100	-	100	-	0	-	0	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-	Belum ada realisasi pengadaan				
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	100	-	100	-	0	-	0	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-	Belum ada realisasi pengadaan				
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-		302.500.000		-		-		-		0%									
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	30	-	6	-	0	-	0	-	0	0	0.00%	-	0	0	0.00%	-	Belum adanya pengadaan sampai Juni 2026				
X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-		5.000.000		-		4.980.000		4.980.000		99.6%									

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN	
									1		2							15 = 14/5*100					
			6		7				8		9			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12					
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP		K	RP	K	%	K	RP				K
3	4	4A																					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	2	-	6	-	0	-	1	-	1	0	16.67%	-	1	0	50.00%	-			1 Unit Eskalator
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-		2.361.407.900		378.501.733		591.815.563		1.135.629.296		8.7983566799%							
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	0	100.00%	-	200	0	100.00%	-			Seluruh Jasa penunjang urusan pemerintah daerah sudah dipenuhi
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						-		169.904.000		27.676.733		65.728.678		93.405.411		22.81%							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	12	-	12	-	3	-	3	-	6	0	50.00%	-	6	0	50.00%	-			1. Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik April 2. Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Mei 3. Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Juni
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						-		2.191.503.900		350.825.000		526.086.885		1.042.223.885		7.712055055%							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	12	-	12	-	3	-	3	-	6	0	50.00%	-	6	0	50.00%	-			1. Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor April 2. Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Mei 3. Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Juni
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-		95.730.000		13.074.000		44.420.664		57.494.664		41.2251384102%							
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	0	100.00%	-	200	0	100.00%	-			Semua Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	200	0	100.00%	-	200	0	100.00%	-			Realisasi sudah sesuai dengan rencana

TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA RENJA SKPD TAHUN BERJALAN				REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (%)		REALISASI KINERJA RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN		TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD S/D TH BERJALAN (%)		FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	KETERANGAN
									1		2							15 = 14/5*100				
			6		7				8		9			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12				
			K	RP	K	RP REN JA	DPA		K	RP	K	RP		K	RP	K	%	K	RP			
3	4	4A	K	RP	K	RP REN JA	K	RP	K	RP	K	RP	K	%	K	RP	K	%				
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-		61.000.00 0		387.000		44.420. 664		44.807.6 64		64.696434 4262%						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	28	-	28	-	3	-	15	-	18	0	53.57%	-	18	0	53.57%	-		6 unit kendaraan operasional Roda Empat yaitu R-21-A, R-1259-XA, R-1388- XA, R-1090-XA, R- 1098-XA, R-1293-XA 11 (9) unit kendaraan operasional roda dua sebesar dengan rincian : a. R-6971-XR (service ke 2) b. R-6883-XH c. R-6722-XH (service ke 2) d. R-6198-XS e. R-6194-XS f. R-6647-XH g. R-6598-XR h. R-6199-XS i. R-6801-XA j. R-6882-XH k. R-6797-XA
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						-		12.090.00 0		11.637.0 00		-		11.637.0 00		96.25%						
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	-	1	-	1	-	0	-	1	0	100.00%	-	1	0	100.00%	-		
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-		22.640.00 0		1.050.00 0		-		1.050.00 0		4.6379505 3%						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	30	-	30	-	3	-	5	-	8	0	16.67%	-	8	0	5.00%	-		2 Printer, 1 PC dan 2 unit AC

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Banyumas sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan serta menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target atau berada pada kategori Sangat Tinggi, terutama pada indikator yang berkaitan dengan pelayanan perpajakan daerah, pendataan dan penetapan wajib pajak, penyelesaian keberatan pajak, pengawasan dan pemeriksaan pajak, penerapan sistem informasi perpajakan, serta penyelenggaraan fungsi penunjang perangkat daerah. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya seluruh tahapan pelayanan sesuai standar operasional prosedur, meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perpajakan, koordinasi yang baik antarbidang, serta konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Perlu dijelaskan bahwa pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah masih terdapat beberapa indikator yang ditandai dengan blok merah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang digunakan pada Renja Tahun 2026 sebelum dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Seiring dengan ditetapkannya Renstra Tahun 2025–2029, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2026 telah menggunakan indikator kinerja yang telah diselaraskan dengan indikator dalam Renstra. Oleh karena itu, indikator yang ditandai dengan blok merah tidak lagi digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja pada Renja Perubahan Tahun 2026, namun tetap ditampilkan sebagai informasi historis untuk menjaga kesinambungan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, sebagian besar indikator yang digunakan dalam Renja Perubahan Tahun 2026 telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator persentase pendaftaran, pendataan, dan penetapan wajib pajak, penyelesaian keberatan pajak, pengawasan dan pemeriksaan pajak, pemenuhan kajian penetapan retribusi, penerapan sistem informasi pajak daerah, serta pelayanan wajib pajak masing-masing telah mencapai target sebesar 100 persen. Terpenuhinya target tersebut dipengaruhi oleh terselenggaranya pelayanan administrasi perpajakan

sesuai jadwal, optimalnya koordinasi antarbidang, pemanfaatan sistem informasi perpajakan yang semakin baik, serta tersedianya sumber daya pendukung yang memadai. Selain itu, percepatan penyelesaian pencetakan massal SPPT PBB-P2 pada Triwulan I Tahun 2026 juga menjadi faktor pendukung utama karena memungkinkan proses distribusi SPPT dan pemungutan PBB-P2 dilaksanakan lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mendukung percepatan realisasi penerimaan pajak daerah.

Di sisi lain, masih terdapat indikator yang belum mencapai target maupun belum dapat diukur. Indikator Persentase Piutang Pajak yang Berhasil Ditagih baru mencapai 46,91 persen atau sebesar 58,64 persen dari target tahun berjalan. Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh masih besarnya nilai piutang pajak yang harus diselesaikan, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, serta proses penagihan yang memerlukan tahapan administratif dan waktu yang relatif panjang. Untuk meningkatkan capaian pada semester II Tahun 2026, Bapenda akan mengoptimalkan penagihan aktif, pemutakhiran basis data piutang, penyampaian surat teguran secara bertahap, serta memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Selain itu, beberapa indikator belum dapat disajikan karena dipengaruhi oleh karakteristik pengukurannya. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah belum dapat diukur karena hasil survei kepuasan masyarakat belum tersedia sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Demikian pula indikator yang berkaitan dengan capaian retribusi daerah belum dapat dihitung secara optimal karena data realisasi dari perangkat daerah pengelola retribusi baru dapat dihimpun secara lengkap pada akhir periode pelaporan. Dengan demikian, belum tersedianya capaian indikator tersebut lebih disebabkan oleh ketersediaan data dan waktu pelaksanaan evaluasi daripada kendala dalam pelaksanaan program.

Pada tingkat kegiatan dan subkegiatan, sebagian besar indikator menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan. Subkegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, pengembangan sistem informasi perpajakan, administrasi keuangan, administrasi umum, serta evaluasi kinerja perangkat daerah telah berjalan sesuai target. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan berbagai

aplikasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, tersedianya sarana pendukung pelayanan, serta terlaksananya pengelolaan administrasi perangkat daerah secara tertib sesuai ketentuan.

Sementara itu, beberapa subkegiatan masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pelaksanaan kegiatan. Sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan mekanisme pelaporan yang semula disusun berdasarkan masing-masing kegiatan menjadi berbasis laporan triwulanan, sehingga sampai dengan Triwulan II baru tersedia satu atau dua dokumen laporan sesuai tahapan pelaksanaan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang memang dijadwalkan dilaksanakan pada semester II, seperti penyesuaian NJOP PBB-P2 dan beberapa kegiatan pengadaan, sehingga realisasi fisik maupun kinerjanya belum dapat ditampilkan pada Triwulan II. Dengan demikian, faktor utama yang memengaruhi rendahnya capaian adalah jadwal pelaksanaan kegiatan, perubahan mekanisme pelaporan, dan karakteristik output yang bersifat tahunan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan administrasi perangkat daerah secara umum juga menunjukkan perkembangan yang baik. Indikator pengelolaan administrasi keuangan, ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban anggaran, pemenuhan layanan penunjang, serta kesesuaian program Renja dengan Renstra telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh tertibnya pengelolaan administrasi, koordinasi yang baik antarunit kerja, serta pelaksanaan pengendalian internal secara berkelanjutan. Sementara itu, indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Nilai SPIP Perangkat Daerah, Indeks Pelayanan Publik (IPP), IKM Perangkat Daerah, dan beberapa indikator evaluatif lainnya belum dapat disajikan karena proses penilaian dan evaluasi baru dilaksanakan pada semester II Tahun 2026. Adapun indikator Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah baru mencapai 34,27 persen sampai dengan Triwulan II. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola pelaksanaan anggaran yang sebagian besar terkonsentrasi pada semester II, terutama untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa serta kegiatan yang penyelesaiannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Banyumas berada pada jalur yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2026. Indikator yang telah mencapai atau melampaui target didukung oleh optimalisasi pelayanan perpajakan, percepatan pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program. Sementara itu, indikator yang belum mencapai target maupun belum dapat diukur pada umumnya dipengaruhi oleh karakteristik waktu pelaksanaan kegiatan, perubahan mekanisme pelaporan, ketersediaan data, serta jadwal pelaksanaan evaluasi oleh instansi terkait. Oleh karena itu, pada semester II Tahun 2026 Bapenda akan memfokuskan upaya pada percepatan penyelesaian kegiatan yang belum terealisasi, optimalisasi penagihan piutang pajak, percepatan penyerapan anggaran, penyempurnaan kualitas basis data pendapatan daerah, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil pendapatan sehingga target kinerja Renja Perubahan Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

TABEL 2.1.3

Tabel Capaian Kinerja Keuangan s.d. TW II Tahun 2026

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
Badan Pendapatan Daerah	17,431,345,462	8,686,572,510	49,81	6,086,252,741	34,92	50,15	37,81
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	12,853,274,962	6,426,637,344	49,98	5,360,320,971	41,7	49,98	44,94
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62,230,097	31,115,040	49,98	20,735,062	33,32	49,98	33,32
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,430,097	4,715,040	49,98	5,085,062	53,92	49,98	53,93
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,800,000	26,400,000	49,98	15,650,000	29,64	49,98	29,64
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,635,948,750	4,817,974,326	49,98	4,090,466,665	42,45	49,98	46,99
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	9,553,188,750	4,776,594,330	49,98	4,065,796,665	42,56	49,98	47,14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	77,760,000	38,880,000	49,98	24,670,000	31,73	49,98	31,73
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	5,000,000	2,499,996	49,98	0	0	49,98	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	390,458,215	195,229,080	49,98	216,327,284	55,4	49,98	55,22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	10,955,000	5,477,496	49,98	42,29	0,39	49,98	0,39
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	58,580,145	29,290,068	49,98	4,344,750	7,42	49,98	7,42
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,998,170	7,499,082	49,98	3,813,216	25,42	49,98	25,42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,250,000	37,624,992	49,98	55,834,155	74,2	49,98	73,28
Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	40,420,400	20,210,196	49,98	342,6	0,85	49,98	0,85

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	185,270,500	92,635,248	49,98	151,950,273	82,02	49,98	82,01
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	4,984,000	2,491,998	49,98	0	0	49,98	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307,500,000	153,749,988	49,98	4,980,000	1,62	49,98	0,64
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	302,500,000	151,249,992	49,98	0	0	49,98	0
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	5,000,000	2,499,996	49,98	4,980,000	99,6	49,98	39,6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,361,407,900	1,180,703,916	49,98	970,317,296	41,09	49,98	41,19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	169,904,000	84,951,996	49,98	93,405,411	54,98	49,98	55,87
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,191,503,900	1,095,751,920	49,98	876,911,885	40,01	49,98	40,05
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,730,000	47,864,994	49,98	57,494,664	60,06	49,98	39,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	61,000,000	30,499,998	49,98	44,807,664	73,46	49,98	41,59
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	22,640,000	11,319,996	49,98	1,050,000	4,64	49,98	1,55
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	12,090,000	6,045,000	49,98	11,637,000	96,25	49,98	96,25

Uraian	Pagu (Rp.)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan(%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,578,070,500	2,259,935,166	49,34	725,931,770	15,86	50,62	17,77
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,578,070,500	2,259,935,166	49,34	725,931,770	15,86	50,62	17,77
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	154,500,000	77,249,994	49,98	43,875,000	28,4	49,98	34,49
Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	147,000,000	73,499,994	49,98	67,840,000	46,15	49,98	48,16
Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	901,000,000	450,499,992	49,98	35,912,500	3,99	49,98	3,99
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	24,000,000	11,999,994	49,98	7,631,900	31,8	49,98	31,8
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1,221,810,500	581,805,240	47,6	363,364,969	29,74	52,36	35,79
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	209,017,500	104,508,738	49,98	10,140,000	4,85	49,98	4,85
Penetapan Wajib Pajak Daerah	1,160,232,500	580,116,240	49,98	93,457,499	8,06	49,98	7,52
Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	132,250,000	66,124,992	49,98	57,650,002	43,59	49,98	49,31
Penagihan Pajak Daerah	510,760,000	255,379,992	49,98	39,549,900	7,74	49,98	7,74
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50,000,000	24,999,996	49,98	3,355,000	6,71	49,98	6,71
Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah	67,500,000	33,749,994	49,98	3,155,000	4,67	49,98	4,67

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Renja Bapenda Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun realisasi beberapa program dan kegiatan masih berada di bawah rencana triwulanan. Realisasi keuangan perangkat daerah mencapai 34,92%, sedangkan realisasi fisik mencapai 37,81%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar dijadwalkan pada semester II, termasuk proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian dokumen pendukung, serta kegiatan yang bersifat tahunan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan mencapai 41,70% dengan realisasi fisik sebesar 44,94%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya sebagian besar kegiatan administrasi sesuai jadwal, bahkan beberapa subkegiatan seperti penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, penyediaan bahan logistik kantor, serta pemeliharaan gedung telah melampaui target Triwulan II. Sementara itu, rendahnya realisasi pada beberapa subkegiatan pengadaan disebabkan proses pengadaan dan pembayaran yang masih berlangsung serta dijadwalkan selesai pada semester II.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah baru mencapai realisasi keuangan sebesar 15,86% dengan realisasi fisik 17,77%. Capaian tersebut masih berada di bawah rencana Triwulan II karena sebagian besar kegiatan teknis, seperti penyuluhan, penagihan pajak, pemeriksaan dan pengawasan pajak, penyelesaian keberatan, serta penyesuaian NJOP PBB-P2 masih dalam proses pelaksanaan dan penyelesaiannya dijadwalkan pada semester II Tahun 2026. Meskipun demikian, subkegiatan analisis dan pengembangan pajak daerah serta pelayanan dan konsultasi pajak daerah telah menunjukkan perkembangan yang baik sebagai hasil optimalisasi pelayanan kepada wajib pajak, pemanfaatan sistem informasi perpajakan, serta percepatan pencetakan massal SPPT PBB-P2 pada awal tahun yang mendukung percepatan penetapan pajak daerah. Perlu dijelaskan pula bahwa indikator yang ditandai dengan blok merah pada Program dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan indikator yang digunakan pada Renja Tahun 2026 sebelum penyesuaian terhadap Renstra Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Pada Renja Perubahan Tahun 2026, indikator tersebut telah diganti dan diselaraskan dengan Renstra, sehingga tidak lagi digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja, namun tetap ditampilkan sebagai informasi historis untuk menjaga kesinambungan pelaporan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan masih berada pada jalur pencapaian target kinerja tahunan. Perbedaan antara rencana dan realisasi pada sebagian indikator lebih banyak dipengaruhi oleh jadwal pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta waktu penyelesaian output yang memang direncanakan

pada semester II, bukan disebabkan oleh kendala substantif dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, pada semester II Tahun 2026 Bapenda akan memfokuskan upaya pada percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran, penyelesaian kegiatan teknis pengelolaan pendapatan daerah, penguatan penagihan piutang pajak, serta peningkatan monitoring dan evaluasi guna memastikan target kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dihadapkan pada berbagai dinamika yang memengaruhi pencapaian target kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, serta subkegiatan. Perubahan kebijakan, perkembangan kondisi ekonomi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik mengharuskan perangkat daerah mampu beradaptasi melalui perencanaan yang responsif, pelaksanaan program yang efektif, dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi sekaligus penyesuaian pelaksanaan program pada Perubahan Renja Tahun 2026.

Salah satu isu penting yang masih menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas dan pemutakhiran data, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Selain itu, dinamika regulasi dan perkembangan kebijakan menuntut perangkat daerah untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menyusun kebijakan, melakukan perencanaan, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Isu tersebut sejalan dengan arah penguatan tata kelola dan transformasi digital yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia, efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan masih memerlukan perhatian. Pengembangan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, serta penyempurnaan mekanisme pelayanan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian, dan kualitas pelayanan publik sebagaimana sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Berdasarkan berbagai isu tersebut, Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan pendanaan sesuai hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada sisa tahun anggaran serta mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2025.

2.3 REVIU TERHADAP RENJA TAHUN 2026

Reviu terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, serta subkegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Reviu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, perkembangan kebijakan, perubahan kondisi yang memengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Proses reviu meliputi penelaahan terhadap kesesuaian tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026. Selain itu, dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan penyesuaian sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan, perubahan regulasi, maupun kebijakan pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil reviu menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen yang memerlukan penyesuaian, baik berupa perubahan target kinerja, indikator, pagu anggaran, maupun penyempurnaan program, kegiatan, dan subkegiatan agar pelaksanaan pada sisa Tahun Anggaran 2026 lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Penyesuaian tersebut tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun hasil reviu terhadap Renja Tahun 2026 sebagaimana dimaksud di atas disajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.3

MATRIKS HASIL REVIU RENJA TAHUN 2026

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH							
5.02	KEUANGAN							
	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah		Rasio PAD	28,18%	28%	17.431.345.462	30%	16.786.819.398
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan PAD	18,64%	5%		4,62%	
			Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	10,528%	5%		5%	
			Persentase Peningkatan PAD	N/A	6%			
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih	94,18%	100%	4.578.070.500	100%	3.907.963.100
			Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak	100%	100%		100%	
			Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan	100%	100%		100%	
			Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8,82%			10%	

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
			Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi	100%	100%		100%	
			Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah	100%	100%		100%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	85,75	86		86	
			Persentase peningkatan Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Reklame, Opsen PKB-BPNKB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	N/A	6%			
			Persentase peningkatan Pajak PBB-P2 dan Pajak BPHTB	N/A	0,5%			
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	N/A	5%			
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Wajib Pajak yang terlayani	100%	100%	4.578.070.500	100%	3.907.963.100
			Jumlah Wajib Pajak Official Assessment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan	1.152.262	1.150.300		1.165.000	
			Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	82,44%	80%		85	
			Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak	100%	100%		100%	

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	100%	100%		100%	
			Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25%	77,78%	100%		85	
			Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/diperbaiki	100%	100%		100%	
			Persentase capaian realisasi pendapatan pajak PBB-P2 dan Pajak BPHTB		100%			
			Persentase capaian realisasi pendapatan pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Reklame, Opsen PKB BPNKB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu		100%			
			Persentase pencapaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		100%			
			Persentase Sub Komponen Pajak yang mencapai Target		66,67%			
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	154.500.000	2 Dokumen	96.400.000
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	147.000.000	4 Dokumen	141.700.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
		Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah						
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	N/A	12 laporan	901.000.000	4 Laporan	715.250.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	1.221.810.500	4 Laporan	910.475.000
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	37 Objek Pajak	20 Objek Pajak	209.017.500	10 Objek Pajak	124.495.500
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.144.262 Dokumen	1.141.000 Dokumen	1.160.232.500	1.156.851 Dokumen	1.287.820.100
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Layanan	10 Layanan	132.250.000	10 Layanan	147.852.500
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	510.760.000	12 Dokumen	399.095.000
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	6.000.000
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	67.500.000	4 Dokumen	58.850.000

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5.02.04.2.01. 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	7 Unit	24.000.000	7 Unit	20.025.000
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,35	90,150		89,35	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,658	3,520		3,35	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,49	3,600		3,52	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	IKM Perangkat Daerah	97,25	95,6	12.853.274.962	95,6	12.878.856.298
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	83,74%	80,2%		83,74%	
			Nilai kematangan organisasi	46	47,1		47,1	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	80,59%	100%		93,4%	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		100%	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	62.230.097	100%	62.231.401,18

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5.02.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	9.430.097	4 Dokumen	9.431.401,18
5.02.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	4 Laporan	4 Laporan	52.800.000	8 Laporan	52.800.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	9.635.948.750	100%	9.445.403.082
			Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%	100%		100%	
5.02.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	37 Orang/ Bulan	9.553.188.750	47 Orang/ Bulan	9.357.843.082
5.02.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	77.760.000	7 Dokumen	82.560.000
5.02.01.2.02. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	12 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	390.458.215	100%	565.143.415
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	67,97	70		70	
5.02.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.955.000	4 Paket	10.955.000
5.02.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	58.580.145	4 Paket	90.380.145

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5.02.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.998.170	4 Paket	14.998.170
5.02.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75.250.000	12 Paket	135.866.000
5.02.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	40.420.400	4 Paket	41.412.300
5.02.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	185.270.500	12 Laporan	261.247.800
5.02.01.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	6 Dokumen	4.984.000	4 Dokumen	10.284.000
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	100%	307.500.000	100%	340.000.000
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%		100%	
5.02.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	30 Unit	302.500.00	18 Unit	335.000.000
5.02.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	6 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	2.361.407.900	100%	2.252.848.399,82

Kode	Bidang Urusan / Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kebutuhan Perubahan Tahun 2026	
					Target Induk	Pagu Indikatif Induk (Rp)	Target Perubahan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5.02.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	169.904.00	12 Laporan	164.903.999,82
5.02.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.191.503.900	12 Laporan	2.087.944.400
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	95.730.000	100%	213.230.000
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%	
5.02.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	61.000.000	28 Unit	151.150.000
5.02.01.2.09. 0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	22.640.000	1 Unit	42.060.000
5.02.01.2.09. 0009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	100 Unit	12.090.000	30 Unit	20.020.000
J U M L A H						17.431.345.46		16.786.819.398

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Penyusunan rencana kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026 tetap selaras dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja, perkembangan kebijakan, perubahan kondisi pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, indikator, program, kegiatan, subkegiatan, pagu anggaran, dan sumber pendanaan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pada sisa Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan program tetap efektif, efisien, dan akuntabel.

Rencana kerja dan pendanaan yang disusun juga memperhatikan hasil reviu terhadap Renja Tahun 2026, perubahan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara optimal.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, pagu anggaran, dan sumber pendanaan yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Rincian rencana kerja dan pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut:

TABEL 3.1

Perubahan Rencana Kerja BAPENDA Kabupaten Banyumas Tahun 2026

No	Kode					Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
									Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
									Sebelum	Sesudah	Renja 2026	APBD 2026	Renja Perubahan 2026			Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					33.879.740.000,00	17.431.345.462,00	16.786.819.398,00				
	5.	0 2				KEUANGAN					33.879.740.000,00	17.431.345.462,00	16.786.819.398,00				
1	5.	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai kematangan organisasi Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi IKM Perangkat Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	100%	100% 47,1 Angka 83,74% 95,6 angka 93,4%	24.444.451.500,00	12.853.274.962,00	12.878.856.298,00				
	5.	0 2	0 1	2 .	0 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100 %	100 %	118.500.000,00	62.230.097,00	62.231.401,18			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 1	2 .	0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	38.500.000,00	9.430.097,00	9.431.401,18	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 1	2 .	0 0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8 Laporan	80.000.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 1	2 .	0 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.243.899.992,00	9.635.948.750,00	9.445.403.082,00		PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 2	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bul an	47 Orang/bul an	15.097.899.992,00	9.553.188.750,00	9.357.843.082,00	Kab. Banyumas	PAD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penvelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi

No	Kode						Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
										Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
										Sebelum	Sesudah	Renja 2026	APBD 2026	Renja Perubahan 2026			Nasional	Daerah
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 2	0 0 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	7 Dokumen	141.000.000,00	77.760.000,00	82.560.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 2	0 0 0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksanya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70 Angka 100%	70 Angka 100%	1.890.710.200,00	390.458.215,00	565.143.415,00		PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	26.998.000,00	10.955.000,00	10.955.000,00	Kab. Banyumas,	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	186.999.500,00	58.580.145,00	90.380.145,00	Kab. Banyumas,	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	82.856.700,00	14.998.170,00	14.998.170,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	429.999.500,00	75.250.000,00	135.866.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	125.000.000,00	40.420.400,00	41.412.300,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi	
	5 .	0 2	0 1	2 0 0 6	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.019.856.500,00	185.270.500,00	261.247.800,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis	

No	Kode						Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
										Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
										Sebelum	Sesudah	Renja 2026	APBD 2026	Renja Perubahan 2026			Nasional	Daerah
								dan Konsultasi SKPD									dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	4 Dokumen	19.000.000,00	4.984.000,00	10.284.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMMD) Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	2.431.296.000,00	307.500.000,00	340.000.000,00		PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	18 Unit	2.300.000.000,00	302.500.000,00	335.000.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	131.296.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.429.095.308,00	2.361.407.900,00	2.252.848.399,82		PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	171.000.000,00	169.904.000,00	164.903.999,82	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.258.095.308,00	2.191.503.900,00	2.087.944.400,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	330.950.000,00	95.730.000,00	213.230.000,00		PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi

No	Kode						Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
										Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
										Sebelum	Sesudah	Renja 2026	APBD 2026	Renja Perubahan 2026			Nasional	Daerah
	5	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	215.000.000,00	61.000.000,00	151.150.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	109.950.000,00	22.640.000,00	42.060.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5	0	0	2	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	12.090.000,00	20.020.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
2	5	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi	86 Angka 25% 100% 100% 100% 100% 100%	86 Angka 10% 100% 100% 100% 100% 100%	9.435.288.500,00	4.578.070.500,00	3.907.963.100,00		PAD		
									Persentase peningkatan Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Reklame, Opsen PKB-BPNKB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Persentase peningkatan Pajak PBB-P2 dan Pajak BPHTB Persentase Peningkatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6% 0,5% 5%								
	5	0	0	2	0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Wajib Pajak Official Assessment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25% Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak Persentase Sistem informasi pajak daerah yang	1.150.300 Angka 100% 100% 100% 100% 80% 100%	1.165.000 Angka 85% 100% 100% 100% 85% 100%	9.435.288.500,00	4.578.070.500,00	3.907.963.100,00		PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi

No	Kode						Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
										Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
										Sebelum	Sesudah	Renja 2026	APBD 2026	Renja Perubahan 2026			Nasional	Daerah
									dikembangkan/diperbaiki Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih Persentase Wajib Pajak yang terlayani									
									Persentase capaian realisasi pendapatan pajak PBB-P2 dan Pajak BPHTB Persentase capaian realisasi pendapatan pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Reklame, Opsen PKB BPNKB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Persentase Sub Komponen Pajak yang mencapai Target	100% 100% 100% 66,67%								
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	432.000.000,00	154.500.000,00	96.400.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	4 Dokumen	260.000.000,00	147.000.000,00	141.700.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	968.007.500,00	901.000.000,00	715.250.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	7 Unit	550.000.000,00	24.000.000,00	20.025.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	4 Laporan	985.000.000,00	1.221.810.500,00	910.475.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	Terlaksananya penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	20 Obyek Pajak	10 Obyek Pajak	394.851.000,00	209.017.500,00	124.495.500,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi

No	Kode						Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
										Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
										Sebelum	Sesudah	Renja 2026	APBD 2026	Renja Perubahan 2026			Nasional	Daerah
							dan Bangunan (BPHTB)											
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.141.000 Dokumen	1.156.851 Dokumen	2.522.800.000,00	1.160.232.500,00	1.287.820.100,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Layanan	10 Layanan	76.000.000,00	132.250.000,00	147.852.500,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 1	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daera	12 Dokumen	12 Dokumen	1.646.630.000,00	510.760.000,00	399.095.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	540.000.000,00	50.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi
	5 .	0 2	0 4	2 .	0 0 1	0 0 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	25 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	67.500.000,00	58.850.000,00	Kab. Banyumas	PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Mendukung Reformasi Birokrasi

3.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. IKK menjadi acuan dalam pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta digunakan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Penetapan IKK mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026, Indikator Kinerja Kunci tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 serta telah diselaraskan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut. Penyesuaian ini dilakukan agar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tetap mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 memuat indikator beserta target kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Melalui penerapan IKK tersebut, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan berlangsung secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil guna mendukung peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI PERUBAHAN TAHUN 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	REALISASI TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2026
1	Rasio PAD (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	%	28,18	30

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 serta mempertimbangkan perkembangan kebijakan, kondisi pelaksanaan, dan kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada sisa Tahun Anggaran 2026 agar tetap selaras dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Melalui Perubahan Renja ini diharapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan pembangunan daerah. Penyesuaian terhadap target kinerja, indikator, pagu anggaran, dan sumber pendanaan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah secara optimal, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2026 juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan yang terukur, pelaksanaan yang konsisten, serta pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal, mendukung peningkatan kinerja organisasi, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan Renja Tahun 2026 memerlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas serta dukungan dari perangkat daerah terkait dan para pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan mampu mengantisipasi berbagai perubahan maupun tantangan yang muncul selama tahun anggaran berjalan.

Selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, Perubahan Renja Tahun 2026 juga menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan

dalam penyempurnaan pelaksanaan program pada sisa Tahun Anggaran 2026 serta sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya, sehingga tercipta kesinambungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2026 ini menyajikan matriks yang memuat Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional tahun 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta berorientasi pada hasil. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi kinerja, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Agustus 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670128 199302 1 001

LAMPIRAN I

Tabel x. Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Piutang Pajak yang berhasil ditagih 2. Persentase Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Wajib Pajak 3. Persentase pelayanan keberatan pengawasan dan pemeriksaan yang diselesaikan 4. Deviasi target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5. Persentase pemenuhan kajian penetapan retribusi 6. Persentase penerapan sistem informasi pajak daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Wajib Pajak yang terlayani 2. Jumlah Wajib Pajak Official Assessment (PBB, Air Tanah, reklame) yang ditetapkan 3. Persentase Wajib Pajak yang berhasil ditagih	Penyusunan kebijakan pengelolaan pendapatan	Tim penyusun kebijakan menerima gratifikasi setelah dokumen kebijakan pengelolaan pendapatan disusun atau ditetapkan.	RF	Internal	KABID PEAP	Belum optimalnya budaya integritas (rasionalisasi) dan pengendalian benturan kepentingan dalam penyusunan dokumen kebijakan pajak daerah (opportunity)	Menurunnya objektivitas penyusunan kebijakan, meningkatnya risiko benturan kepentingan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak daerah.	Mewajibkan pencantuman pernyataan komitmen anti gratifikasi pada setiap dokumen kajian, analisis atau rekomendasi sebagai bagian dari pengendalian integritas dalam penyusunan dokumen kebijakan pajak daerah
2				4. Persentase Penyelesaian Keberatan Pajak 5. Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak 6. Persentase OPD pengelola retribusi yang deviasinya tidak lebih dari 25% 7. Persentase sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan/ diperbaiki	Penyusunan target pendapatan daerah	Penyusunan target pajak daerah tidak didasarkan pada kajian potensi sehingga target yang ditetapkan kurang akurat	RK	Internal dan Eksternal	KABID PEAP, KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya penyusunan kajian potensi pajak daerah dan penghimpunan data potensi secara berkelanjutan sebagai dasar penetapan target PAD	Target pendapatan menjadi tidak realistis sehingga realisasi PAD berpotensi tidak tercapai atau potensi pendapatan tidak tergalil secara optimal.	1. Menyusun kajian potensi pajak daerah sebagai dasar penyusunan target PAD. 2. Melakukan pemetaan potensi pajak daerah berdasarkan hasil pendataan, realisasi penerimaan, dan perkembangan objek pajak.
3					Identifikasi subjek dan objek pajak	Pendataan belum menjangkau seluruh objek dan subjek pajak sehingga masih terdapat potensi pajak yang belum teridentifikasi.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya pemanfaatan berbagai sumber informasi serta pelaksanaan pendataan dan identifikasi objek maupun subjek pajak secara menyeluruh dan berkelanjutan.	Potensi pajak tidak terdata, basis data tidak lengkap, serta terjadi kehilangan potensi penerimaan daerah.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi potensi objek pajak dari masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan door to door (Sengkuyung) bersama UPPD Samsat dan pemerintah

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah										desa/kelurahan untuk pendataan kendaraan bermotor serta penyampaian imbauan kepatuhan pembayaran PKB dan Opsen PKB. 3. Melakukan penyisiran lapangan terhadap objek pajak yang belum terdaftar, khususnya reklame dan PBJT.
4						Petugas pendataan menerima gratifikasi setelah pendataan, pendaftaran, atau verifikasi objek pajak selesai dilaksanakan.	RF	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Masih adanya interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak yang berpotensi menimbulkan pemberian gratifikasi. (opportunity)	Menurunnya integritas petugas, ketidakakuratan data objek pajak, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pendataan	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan pendataan serta menyediakan QR Code kanal pengaduan bagi wajib pajak.
5					Pemutakhiran basis data pajak	Pemutakhiran basis data tidak dilakukan secara berkala sehingga data wajib pajak tidak akurat.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya mekanisme pemutakhiran dan validasi basis data wajib pajak.	Basis data menjadi tidak akurat sehingga penetapan, penagihan, dan pengawasan pajak menjadi kurang efektif.	1. Menetapkan jadwal dan mekanisme baku pemutakhiran basis data wajib pajak secara berkala. 2. Melaksanakan pemutakhiran basis data berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.
6					Sosialisasi dan edukasi perpajakan	Sosialisasi belum menjangkau seluruh kelompok wajib pajak sehingga kepatuhan belum optimal.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya strategi komunikasi perpajakan melalui segmentasi kelompok wajib pajak dan pemanfaatan media	Tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak rendah sehingga berpotensi menurunkan realisasi	1. Menyusun strategi sosialisasi berdasarkan segmentasi kelompok wajib pajak. 2. Menyusun dan mempublikasikan video

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										digital sehingga informasi perpajakan belum menjangkau seluruh wajib pajak secara efektif	penerimaan pajak daerah.	edukasi mengenai manfaat pajak daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui media digital. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan Government Auto Show (GAS) sebagai media sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
7						Petugas penyuluhan menerima gratifikasi setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan atau edukasi perpajakan daerah	RF	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya penyampaian pesan integritas kepada masyarakat pada setiap kegiatan penyuluhan.	Menurunnya integritas petugas penyuluhan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas, Mencantumkan QR Code kanal pengaduan dan pernyataan pelayanan bebas gratifikasi pada media penyuluhan.
8					Penetapan wajib pajak daerah	Petugas penilai atau petugas penetapan menerima gratifikasi setelah hasil penilaian objek pajak ditetapkan atau dokumen penetapan diterbitkan.	RF	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Masih terdapat ruang diskresi dan interaksi langsung dalam proses penilaian dan penetapan pajak (opportunity), serta belum optimalnya pemahaman wajib pajak mengenai pelayanan penilaian dan penetapan pajak yang bebas biaya serta larangan pemberian gratifikasi	Menurunnya integritas petugas yang mengakibatkan ketidakakuratan data dan objektivitas penilaian objek pajak, sehingga berpotensi memengaruhi penerimaan pajak daerah serta menurunkan kepercayaan masyarakat.	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas pelaksanaan penilaian dan penetapan pajak serta pada Surat Pemberitahuan kepada wajib pajak, disertai QR Code kanal pengaduan bagi wajib pajak.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										kepada pegawai (rationalization).		
9					Pelaksanaan pemungutan pajak	Pelaksanaan pemungutan pajak belum optimal sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah.	Target penerimaan pajak tidak tercapai, piutang meningkat, dan efektivitas pemungutan menurun.	1. Menyelenggarakan gathering wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran membayar pajak 2. Mengoptimalkan pemasangan dan pemanfaatan Alat Monitoring Pajak (AMP) pada objek PBJT. 3. Melaksanakan intensifikasi pemungutan melalui klarifikasi, konfirmasi, dan pemanggilan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
10					Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak	Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak tidak dilaksanakan sesuai rencana sehingga target pemeriksaan tidak tercapai.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PEAP	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak.	Target pemeriksaan tidak tercapai sehingga potensi penerimaan pajak daerah belum tergali secara optimal dan kepatuhan wajib pajak tidak meningkat.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak untuk memastikan pencapaian target pemeriksaan

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11						Petugas pemeriksa menerima gratifikasi setelah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah diselesaikan.	RF	Internal dan Eksternal	KABID PEAP	Masih adanya interaksi langsung antara pemeriksa dan wajib pajak yang berpotensi menimbulkan gratifikasi setelah pemeriksaan selesai. (opportunity)	Menurunnya independensi pemeriksa, objektivitas hasil pemeriksaan, efektivitas pengawasan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pajak daerah.	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas pemeriksaan, menyediakan QR Code kanal pengaduan, serta melakukan reviu laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pengendali Mutu
12					Pengelolaan keberatan perpajakan	Petugas penyelesaian permohonan dan keberatan menerima gratifikasi setelah surat keputusan atas permohonan, pengurangan, pembetulan, atau keberatan pajak daerah diterbitkan.	RF	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai larangan pemberian gratifikasi dalam proses penyelesaian permohonan dan keberatan pajak (rasionalisasi)	Menurunnya objektivitas dalam penyelesaian permohonan dan keberatan pajak daerah serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil keputusan	Mencantumkan disclaimer "Pelayanan Gratis dan Bebas Gratifikasi" pada dokumen penyelesaian permohonan dan keberatan serta memasang media informasi anti gratifikasi pada ruang pelayanan
13					Penertiban obyek dan/atau subyek pajak	Penertiban belum menjangkau seluruh wajib pajak yang tidak patuh.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya basis data wajib pajak tidak patuh yang mutakhir serta keterbatasan personel dan sarana pelaksanaan penertiban.	Kepatuhan wajib pajak tidak meningkat, potensi pajak hilang, dan tercipta ketidakadilan dalam pemungutan pajak.	1. Melaksanakan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan penertiban terhadap wajib pajak yang tidak patuh. 2. Melaksanakan penyisiran lapangan secara berkala terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. 3. Melaksanakan pemanggilan dan klarifikasi

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kepada wajib pajak yang belum patuh.
14					Pengelolaan piutang pajak	Monitoring piutang belum optimal sehingga saldo piutang terus meningkat.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya koordinasi dalam verifikasi data piutang pajak sehingga informasi piutang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir	Saldo piutang terus meningkat, risiko piutang tidak tertagih semakin besar, dan penerimaan daerah menurun.	1. Melaksanakan verifikasi data piutang pajak bekerja sama dengan kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan wali pajak daerah 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi piutang pajak daerah secara berkala.
15					Penagihan piutang pajak	Pelaksanaan penagihan piutang belum optimal sehingga piutang terus meningkat.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya strategi penagihan piutang yang mampu mendorong wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajak.	Piutang pajak meningkat, penerimaan daerah tidak optimal, dan efektivitas pengelolaan piutang menurun.	1. Melaksanakan program apresiasi bagi wajib pajak PBB-P2 yang melunasi seluruh tunggakan. 2. Melaksanakan penagihan aktif melalui surat teguran, pemanggilan, dan konfirmasi. 3. Menyelenggarakan Gerakan Pekan Pembayaran PBB-P2.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16						Petugas penagihan menerima gratifikasi setelah pelaksanaan penagihan pajak daerah	RF	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Masih adanya interaksi langsung antara petugas penagihan dan wajib pajak yang berpotensi menimbulkan gratifikasi (opportunity)	Menurunnya independensi petugas penagihan, berkurangnya efektivitas penagihan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penagihan	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas petugas penagihan serta menyediakan QR Code kanal pengaduan bagi wajib pajak
17					Pengembangan sistem informasi pendapatan	Gangguan sistem informasi, kegagalan integrasi, atau serangan siber mengganggu pelayanan perpajakan.	RO	Internal dan Eksternal	KABID PEAP	Belum optimalnya pengelolaan keamanan sistem informasi.	Pelayanan perpajakan terganggu, kehilangan atau kerusakan data, kebocoran informasi, dan penurunan kepercayaan pengguna.	1. Melaksanakan monitoring keamanan sistem informasi serta pengujian backup dan disaster recovery secara berkala. 2. Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Pajak Daerah beserta aplikasi pendukung.
18						Petugas pengelola sistem informasi menerima gratifikasi dari penyedia aplikasi atau pihak ketiga.	RF	Internal dan Eksternal	KABID PEAP	Belum optimalnya pengendalian hubungan kerja dengan penyedia aplikasi atau pihak ketiga (opportunity)	Menurunnya independensi dalam pengembangan sistem informasi, meningkatnya konflik kepentingan dengan penyedia aplikasi, dan menurunnya kepercayaan terhadap pengelolaan sistem informasi	Mencantumkan klausul anti gratifikasi pada Surat Tugas pengembangan/pemeliharaan aplikasi serta menyampaikan komitmen anti gratifikasi kepada penyedia aplikasi atau pihak ketiga sebelum pekerjaan dilaksanakan

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19					Pelayanan Perpajakan	Petugas pelayanan menerima gratifikasi setelah memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak	RF	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I & II	Belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai larangan pemberian gratifikasi kepada petugas pelayanan. (rasionalisasi)	Menurunnya integritas pelayanan, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda	Menyediakan media informasi "Pelayanan Bapenda Gratis dan Bebas Gratifikasi" yang dilengkapi QR Code kanal pengaduan pada setiap meja pelayanan sebagai pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan perpajakan.
20						Petugas pelayanan verifikasi BPHTB menerima gratifikasi setelah dokumen BPHTB diterbitkan	RF	Internal dan Eksternal	KABID PAJAK DAERAH I	Masih terdapat komunikasi langsung antara petugas dengan wajib pajak/PPAT yang berpotensi menimbulkan gratifikasi (opportunity)	Menurunnya objektivitas proses validasi BPHTB, meningkatnya potensi perlakuan khusus, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BPHTB	100% permohonan BPHTB diproses melalui sistem elektronik dan seluruh komunikasi pelayanan menggunakan kanal resmi Bapenda.
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. IKM Perangkat Daerah 2. Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah 3. Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi 4. Nilai kematangan organisasi 5. Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	Pengelolaan kas perangkat daerah	Adanya gratifikasi dalam distribusi penggunaan kas perangkat daerah dari PPTK ke bendahara	RF	Internal	SEKRETARIS	Masih terdapat interaksi langsung dan ruang diskresi dalam proses distribusi penggunaan kas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemahaman pegawai mengenai larangan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. (Opportunity, Rationalization)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2. Perencanaan penggunaan kas perangkat daerah setiap bulan

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22		Urusan Pemerintah Daerah			Verifikasi pertanggungjawab an anggaran belanja perangkat daerah	Penyalahgunaan uang persediaan untuk kepentingan pribadi	RF	Internal	SEKRETARIS	Masih terdapat kelemahan pengendalian dalam pengelolaan uang persediaan, termasuk pengawasan dan pemisahan fungsi yang belum optimal. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1 Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2 Perencanaan penggunaan kas perangkat daerah setiap bulan
23					Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Adanya salah saji material dalam laporan keuangan	RF	Internal	SEKRETARIS	Masih terdapat kelemahan dalam proses review dan rekonsiliasi laporan keuangan sebelum penyampaian. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Audit laporan keuangan 2. Melaksanakan review laporan keuangan secara berjenjang sebelum disampaikan.
24			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Penyediaan barang pakai habis perangkat daerah	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana/kegiatan	RF	Internal	SEKRETARIS	Masih terdapat kelemahan dalam proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan, serta adanya tekanan untuk mempercepat penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran. (Opportunity, Pressure)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (Pakta Integritas) 2. Melaksanakan review dan verifikasi SPJ secara berjenjang.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal)	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25					Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Adanya gratifikasi dalam menentukan personil yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dari pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke pptk	RF	Internal dan Eksternal	SEKRETARIS	Masih terdapat ruang diskresi dalam penetapan personel koordinasi dan konsultasi tanpa kriteria yang terdokumentasi secara memadai. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Pembatasan personil yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi sesuai SE Efisiensi 2. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas)
26			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD) 2. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Persekongkolan antar sesama penyedia dalam mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa.	RF	Internal dan Eksternal	SEKRETARIS	Masih terdapat peluang komunikasi dan pertukaran informasi antar penyedia selama proses pemilihan penyedia. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Penguatan integritas dengan kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2. Optimalisasi Pengawasan dari atasan langsung.
27					Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Pemberian suap dari penyedia kepada Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan pengadaan	RF	Internal dan Eksternal	SEKRETARIS	Masih terdapat interaksi langsung antara penyedia dan penyelenggara negara di luar mekanisme resmi, serta masih adanya anggapan	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi	1. Penguatan integritas dengan kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas)

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										bahwa pemberian hadiah dapat memperlancar proses pengadaan. (Opportunity, Rationalization)	5. Penurunan Kinerja	2. Optimalisasi Pengawasan dari atasan langsung.
28					Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	PPK/Pejabat menerima gratifikasi	RF	Internal dan Eksternal	SEKRETARIS	Masih terdapat ruang diskresi dalam pelaksanaan kewenangan PPK/Pejabat, serta belum optimalnya pemahaman mengenai benturan kepentingan dan larangan gratifikasi. (Opportunity, Rationalization)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Penguatan integritas melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan. 2. Melaksanakan review berkala terhadap dokumen pengadaan oleh atasan langsung atau APIP.
29			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Adanya gratifikasi dalam penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah dari pihak eksternal kepada PPK/Pejabat	RF	Internal dan Eksternal	SEKRETARIS	Masih terdapat interaksi langsung antara penyedia jasa penunjang dan pejabat yang berwenang, serta belum optimalnya pemahaman mengenai larangan gratifikasi dalam hubungan kerja dengan pihak ketiga. (Opportunity, Rationalization)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Penguatan integritas melalui penandatanganan Pakta Integritas bagi PPK/Pejabat dan penyedia jasa.

No	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal/ Internal dan Eksternal	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi/ Kerugian/ Dampak	Rencana Penanganan yang akan dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 2. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Rekonsiliasi aset perangkat daerah	Adanya gratifikasi dalam distribusi pengguna aset dari pegawai yang menerima aset ke pengelola BMD	RF	Internal dan Eksternal	SEKRETARIS	Masih terdapat ruang diskresi dalam proses distribusi dan penetapan pengguna aset daerah. (Opportunity)	1. Kerugian Keuangan Negara, 2. Penurunan Reputasi 3. Sanksi Pidana/Perdata 4. Gangguan terhadap Layanan Organisasi 5. Penurunan Kinerja	1. Kebijakan pimpinan tentang transparansi pelayanan (pakta integritas) 2. Updating Kartu Inventarisasi Barang